

PERBANDINGAN SEBELUM DAN SESUDAH MENGGUNAKAN APLIKASI SISKEUDES DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEMBANGUNAN DESA

Morenly Marchel Welley¹, Rosalina A.M. Koleangan², George M.V. Kawung³

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Magister Ilmu Ekonomi
Universitas Sam Ratulangi*

ABSTRAK

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Peran dan fungsi aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) khususnya BPKP dalam rangka membantu pemerintah desa diantaranya melakukan pengawalan dalam pemberian bimbingan dan konsultasi terkait pengelolaan keuangan desa. Untuk bisa melaksanakan bimbingan dimaksud, diperlukan peningkatan pengetahuan dan keterampilan para auditor mengenai pengelolaan keuangan desa. Untuk mencapai tujuan di atas, BPKP telah menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa pada Bulan April 2015. Badan Pemeriksa Keuangan (BPKP) juga mengeluarkan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan sebelum dan sesudah menggunakan aplikasi SISKEUDES dalam pengelolaan keuangan desa dan dampaknya terhadap pembangunan Desa. Penelitian ini merupakan jenis penelitian komparasi atau perbandingan. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 38 Responden yang terdiri dari 19 bendahara dan 19 Kasie Keuangan. Teknik pengumpulan data menggunakan kuisioner dan menggunakan teknik analisis data *Paired Sample t-test*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan sebelum dan sesudah menggunakan aplikasi SISKEUDES di pada Desa-desanya di Kecamatan Sonder, terdapat perbedaan pengelolaan keuangan desa sebelum dan sesudah menggunakan aplikasi SISKEUDES di pada Desa-desanya di Kecamatan Sonder dan terdapat perbedaan pembangunan desa sebelum dan sesudah menggunakan aplikasi SISKEUDES di pada Desa-desanya di Kecamatan Sonder.

Kata kunci: *keuangan desa, siskeudes, pengelolaan keuangan desa, pembangunan desa*

ABSTRACT

Village Finance is all village rights and obligations that can be valued with money and everything in the form of money and goods related to the implementation of the rights and obligations of the Village. The role and function of the government internal control apparatus (APIP) especially the BPKP in order to help village governments include escorting in providing guidance and consultation regarding village financial management. To be able to carry out the intended guidance, it is necessary to increase the auditor's knowledge and skills regarding village financial management. To achieve the above objectives, the BPKP has issued a Guidance for Implementation and Village Financial Management Consultation in April 2015. The Supreme Audit Agency (BPKP) also issued a Village Financial System Application (SISKEUDES). The purpose of this study was to determine the differences before and after using the SISKEUDES application in managing village finances and their impact on the development of the Village. This research is a type of comparative research or comparison. The sample in this study amounted to 38 respondents consisting of 19 treasurers and 19 Head of Finance. Data collection techniques using questionnaires and using data analysis techniques Paired Sample t-test. The results showed that there were differences before and after using the SISKEUDES application in the villages in Sonder District, there were differences in village financial management before and after using the SISKEUDES application in the villages in Sonder District and there were differences in village development before and after using the application SISKEUDES is in Villages in Sonder District.

Keywords: *village finance, siskeudes, village financial management, village development*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri, termasuk pengelolaan keuangannya, serta melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Implementasi UU Nomor 6 tentang Desa ini selaras dengan Program Pembangunan Nasional yang tertuang dalam RPJM Nasional 2015-2019 yaitu “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan DESA dalam kerangka NKRI”. Sebagai tindak lanjutnya, dalam APBN-P 2015 telah dialokasikan Dana Desa sebesar ± Rp 20,776 triliun untuk 74.093 desa yang tersebar di Indonesia, dan pada tahun-tahun berikutnya akan terus bertambah bahkan akan mencapai lebih dari 1 milyar untuk tiap desa (www.bpkp.go.id, 2018). UU Nomor 6 tentang Desa pasal 72 tentang dana desa dinyatakan bahwa desa juga mengelola keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Transfer lainnya berupa Alokasi Dana Desa (ADD); Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota; dan Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Sementara itu pengelolaan keuangan desa merupakan seluruh rangkaian kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Selain itu pemerintah desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Begitu besar peran yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas mengingat dalam pengelolaan keuangan desa tersebut, pemerintah desa dituntut membuat beberapa laporan (www.bpkp.go.id, 2018). Untuk dapat menerapkan prinsip akuntabilitas tersebut, diperlukan berbagai sumber daya dan sarana pendukung, diantaranya sumber daya manusia yang kompeten serta dukungan sarana teknologi informasi yang memadai dan dapat diandalkan.

Peran dan fungsi aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) khususnya BPKP dalam rangka membantu pemerintah desa diantaranya melakukan pengawalan dalam pemberian bimbingan dan konsultasi terkait pengelolaan keuangan desa. Untuk bisa melaksanakan bimbingan dimaksud, diperlukan peningkatan pengetahuan dan keterampilan para auditor mengenai pengelolaan keuangan desa. Untuk mencapai tujuan di atas, BPKP telah menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa pada Bulan April 2015. Badan Pemeriksa Keuangan (BPKP) juga mengeluarkan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SisKeuDes). Aplikasi ini diperuntukkan bagi kebutuhan pengelolaan keuangan Desa. Di kabupaten Minahasa melalui pemerintah daerahnya mengharuskan semua desa untuk menggunakan aplikasi SISKEUDES. Hal tersebut juga mempengaruhi desa-desa di Kecamatan Sonder untuk menggunakan aplikasi tersebut. Berikut ini adalah desa-desa yang ada dikecamatan Sonder :

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM MAGISTER ILMU EKONOMI

Tabel 1
Desa-desanya di Kecamatan Sonder

No	Desa
1	Kauneran
2	Kauneran Satu
3	Kolongan Atas
4	Kolongan Atas Satu
5	Kolongan Atas Dua
6	Leilem
7	Leilem Dua
8	Leilem Tiga
9	Rambunan
10	Rambunan Amian
11	Sawangan
12	Sendangan
13	Sendangan Satu
14	Talikuran
15	Talikuran Satu
16	Timbukar
17	Tincep
18	Tounelet
19	Tounelet Satu

Sumber : Kantor Kecamatan Sonder, 2018

Adanya 19 desa di Kecamatan Sonder pengelolaan dana desa dan pembangunan desa sangat menjadi prioritas bagi pemerintah kecamatan. Ditambah lagi dengan adanya potensi Investasi yang ada di Kecamatan Sonder seperti Obsidian yang berada di Desa Leilem, Energi Listrik Tenaga Mikro di Desa Tincep, Tanaman Pangan dan Perkebunan jagung dan cengkih, Peternakan Babi, sapi Potong, Ayam Buras dan Ras, Budidaya ikan air Tawar :Mas, Nila, Kodok Pengembangan objek wisata Pengembangan fasilitas wisata air tejun di desa tincep, arum jeram di desa timbukar dan taman eman di sonder jika ditunggang dengan fasilitas dan infrastruktur dari data desa maka tingkat kesejahteraan di masa yang akan datang akan semakin baik.

Permasalahan yang dihadapi, masih banyak bendahara yang belum tahu cara menggunakan aplikasi ini, bahkan belum tahu bagaimana cara mendapatkan aplikasi ini. Selanjutnya untuk menanggulangi masalah tersebut maka dibuatlah materi pembelajaran pada Diklat Pengelolaan Keuangan Desa maka disusunlah Modul Pengelolaan Keuangan Desa, diadakannya Bimbingan Teknis tentang cara mengelola keuangan desa dan penggunaan aplikasi SISKEUDES. Pemerintah Daerah juga telah mengambil langkah-langkah sebagai upaya Penguatan Desa dan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparat Desa, penguatan Administrasi Keuangan Desa untuk menghadapi Dana Desa khususnya yang bersumber dari dana APBN baik melalui Bimbingan Teknis, Pendidikan dan Pelatihan maupun Sosialisasi. Penelitian Salindeho, Kalangi dan Warongan (2017) ini menemukan beberapa hambatan dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana desa, misalnya regulasi yang menyebabkan hambatan dalam struktur birokrasi. Regulasi yang mengatur pada proses perencanaan tidak sesuai dengan kebutuhan dasar prioritas yang ada di desa. Hambatan lainnya adalah keterbatasan pengetahuan dan pemahaman sumber daya manusia, komunikasi yang tidak efektif antara kepala desa dengan perangkat desa lainnya maupun antara kepala desa dengan masyarakat. Pemerintah daerah harus mengadakan sosialisasi dan bimbingan kepada bendahara desa tentang SISKEUDES. Hasil penelitian Juardi, Muchlis dan Putri (2018) menunjukkan bahwa di Desa Jenetallasa dalam melakukan penerapan Aplikasi SISKEUDES telah

menjalankan secara menyeluruh dan dalam proses pengimputan dan pelaporannya di Desa Jennetallsa sudah mekalukan proses pertanggungjawaban yang sudah relevan dan dalam menjalankan aplikasi tersebut sudah terstruktur dengan baik. Penelitian Syaifullah dan Burhanuddin (2018) menunjukkan bahwa ssetelah SISKEUDES digunakan memberikan manfaat bagi pengelolaan dana desa, karena pelaporan keuangan menjadi lebih efisien, efektif, dan terintegrasi sehingga laporan keuangan desa dapat lebih berkualitas dibandingkan belum menggunakan SISKEUDES.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah perbedaan pelaporan keuangan sebelum dan sesudah menggunakan aplikasi SISKEUDES dalam pengelolaan keuangan desa dan dampaknya terhadap pembangunan desa?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui perbedaan pelaporan keuangan sebelum dan sesudah menggunakan aplikasi SISKEUDES dalam pengelolaan keuangan desa dan dampaknya terhadap pembangunan desa.

Tinjauan Pustaka

Pengelolaan Keuangan

Keuangan Daerah atau anggaran daerah merupakan rencana kerja pemerintahdaerah dalam bentuk uang (rupiah) dalam satu periode tertentu. Selanjutnya Anggaran daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah (Mardiasmo, 2002:9). Menurut Halim (2007) Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan pengertian Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Pelaporan Keuangan Daerah

Laporan keuangan merupakan hasil atau output dari serangkaian proses pencatatan dan pengikhtisaran atas transaksi-transaksi yang terjadi dalam suatu periode tertentu. Nordiawan (2007: 294) mendefinisikan laporan keuangan sebagai laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Secara umum, tujuan laporan keuangan disusun adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban entitas ekonomi atas penggunaan dan pengelolaan sumber daya yang dimiliki dalam suatu periode tertentu. Oleh karena itulah laporan keuangan desa berfungsi sebagai alat evaluasi karena menyediakan informasi posisi keuangan entitas tersebut serta menunjukkan kinerja yang telah dilakukan sehingga nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan bagi kepala desa sendiri maupun pemangku kepentingan lainnya (Pemerintah, BPD, dan masyarakat). Dari tujuan umum tersebut, dapat disimpulkan beberapa manfaat pentingnya laporan keuangan bagi pemerintah desa, antara lain:

1. Mengetahui tingkat efektivitas, efisiensi dan kebermanfaatn pengelolaan sumberdaya ekonomi oleh pemerintah desa dalam satu tahun anggaran.
2. Mengetahui nilai kekayaan bersih yang dimiliki desa sampai dengan posisi terakhirperiode pelaporan.
3. Sebagai alat evaluasi yang lebih informatif tentang kinerja aparatur desa utamanyakepala desa.
4. Sebagai sarana pengendalian terhadap kemungkinan terjadinya praktik penyalahgunaan ataupun penyimpangan sumber-sumber ekonomi yang dimiliki desa.
5. Sebagai wujud riil implementasi azas transparansi dan akuntabilitas yangdijaminatkan peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan model praktis bagientitas lain.

Pembangunan Daerah

Pembangunan secara berencana lebih dirasakan sebagai suatu usaha yang lebih rasional dan teratur bagi pembangunan masyarakat yang belum atau baru berkembang (Subandi: 2011:9-11). Tiga tujuan inti pembangunan menurut Todaro (2005) adalah

1. peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai macam barang kebutuhan hidup yang pokok seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan perlindungan keamanan;
2. peningkatan standar hidup yang tidak hanya berupa peningkatan pendapatan, tetapi juga meliputi penambahan penyediaan lapangan kerja, perbaikan pendidikan, serta peningkatan perhatian atas nilai-nilai kultural dan kemanusiaan;
3. perluasan rentang pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu dan bangsa, yakni membebaskan mereka dari ketergantungan.

Keuangan Desa

Widjaja (2003) menyatakan bahwa desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban (Hanif, 2011). Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.

Sistem Informasi Manajemen Daerah dan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)

Sistem informasi secara teknis dapat didefinisikan sebagai kumpulan komponen yang saling berhubungan, mengumpulkan (atau mendapatkan), memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk menunjang pengambilan keputusan dan pengawasan dalam suatu organisasi. Selain menunjang proses pengambilan keputusan, koordinasi, dan pengawasan, system informasi juga dapat membantu manajer dan karyawan menganalisis permasalahan, menggambarkan hal-hal yang rumit, dan menciptakan produk baru (Laudon dan Laudon, 2012: 15). Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan aplikasi yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Dengan proses penginputan sekali sesuai dengan transaksi yang ada, dapat menghasilkan output berupa dokumen penatausahaan dan laporan-laporan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, antara lain:

- a. Dokumen Penatausahaan;
- b. Bukti Penerimaan;
- c. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- d. Surat Setoran Pajak (SSP);
- e. Dan dokumen-dokumen lainnya
- f. Laporan-laporan:
- g. Laporan Penganggaran (Perdes APB Desa, RAB, APB Desa per sumber dana);
- h. Laporan Penatausahaan (Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku Pajak, Buku Pembantu, dan Register)

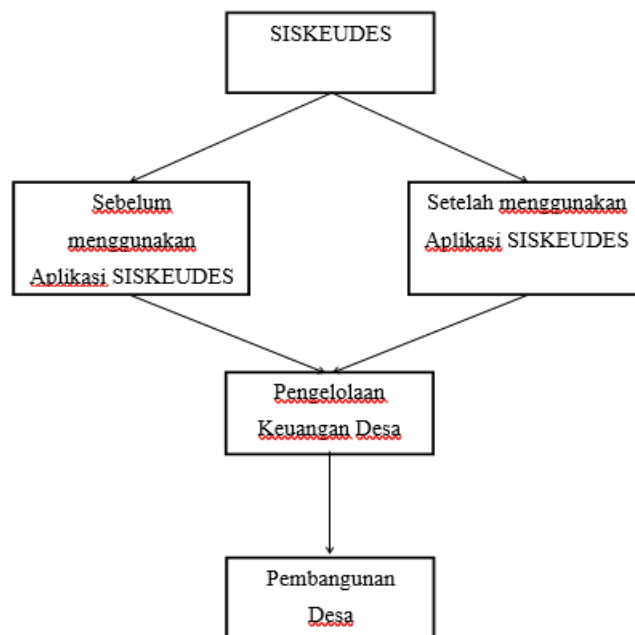
Penelitian Terdahulu

Penelitian Juardi, Muchlis dan Putri (2018) yang bertujuan untuk mengevaluasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan desa pada Desa Jenetallasa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan paradigma interpretative. Data diperoleh dengan observasi dan wawancara secara mendalam, kemudian diproses tiga tahap yakni reduksi data, penyajian data sampai penarikan kesimpulan, Keabsahan data dilakukan dengan uji credibility, triangulasi sumber data, triangulasi teori dan uji transferability. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Desa Jenetallasa dalam melakukan penerapan Aplikasi SISKEUDES telah menjalankan secara menyeluruh dan dalam proses penginputan dan pelaporannya di Desa Jenetallasa sudah melakukan proses pertanggungjawaban yang sudah relevan dan dalam menjalankan aplikasi tersebut sudah terstruktur dengan baik.

.Penelitian Juwaini, Akram dan Husnan (2018) bertujuan untuk memahami dan menganalisis proses administrasi keuangan desa menggunakan aplikasi SISKEUDES yang menyebabkan keterlambatan laporan dan mencari solusi terhadap kendala yang dihadapi dalam kegiatan administrasi keuangan desa menggunakan aplikasi SISKEUDES, dengan pendekatan kualitatif. Populasi adalah administrasi desa di Kabupaten Dompu dan mengambil 4 desa sebagai sampel dari 72 desa, dan jumlah responden adalah 10 orang. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah: Pengumpulan data, reduksi data, tampilan data, verifikasi dan konfirmasi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat sumber daya manusia memiliki dampak yang besar terhadap kinerja aparat desa dalam kegiatan administrasi, dan dalam proses administrasi menggunakan aplikasi SISKEUDES terdapat kegiatan penipuan pada proses pembayaran pajak sehingga menunda keterlambatan pelaporan akuntabilitas akhir tahun.

Penelitian Setyawan, Priyono dan Iswanaji (2017) ini bertujuan untuk menganalisis kemampuan desa untuk melakukan pengelolaan dana desa dan kemudian mengembangkan sistem e-budgeting dan pelaporan untuk alokasi dana di Desa Balesari. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian dan pengembangan model penelitian yang dilakukan penelitian untuk mengembangkan suatu sistem. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan model studi kasus. Informan penelitian adalah aparat desa dengan 10 petugas. Data penelitian diperoleh dengan metode wawancara mendalam dengan orang yang diwawancarai dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan e-budgeting dalam kegiatan anggaran Pemerintah Kabupaten Magelang memiliki realisasi dana desa yang sangat efisien yaitu dengan membuat proses kegiatan anggaran, mulai dari perencanaan, penganggaran, menjadi kontrol anggaran yang lebih cepat dan dapat mengurangi biaya dihabiskan oleh Pemerintah Desa Balesari dalam mencapai realisasi anggaran. Semua data dari tahap proposal hingga akhir tahun anggaran telah diintegrasikan dan disimpan dengan baik sehingga perlu untuk asal usul anggaran dan implementasi yang akan diperoleh melalui sistem e-budgeting dan e-reporting. Pemerintah Republik Indonesia adalah cara terbaik untuk melakukannya. Namun, para pejabat desa belum siap untuk implementasi UU 6/2014 dan belum sepenuhnya memahami pengelolaan dana desa berdasarkan Permendagri 113/2014.

Kerangka Konseptual



Gambar 1.
Kerangka Konseptual

Hipotesis Penelitian

Hipotesis dalam suatu penelitian berarti jawaban sementara, patokan duga, atau dalil sementara yang kebenarannya akan dibuktikan dalam penelitian tersebut. Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian, pengembangan teori dan kajian empiris serta model penelitian maka hipotesis dalam penelitian ini adalah diduga terdapat perbedaan pelaporan keuangan desa sebelum dan sesudah penggunaan aplikasi SISKEUDES dalam pengelolaan keuangan desa dan dampaknya terhadap pembangunan desa.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian komparatif. Penelitian komparatif menurut Sugiyono (2014:54) adalah penelitian yang membandingkan keadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda, atau dua waktu yang berbeda. Adapun penerapan penelitian komparatif pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui perbandingan pelaporan keuangan sebelum dan sesudah menggunakan Aplikasi SISKEUDES dalam pengelolaan keuangan Desa dan dampaknya terhadap Pembangunan Desa.

Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yaitu Kecamatan Sonder yaitu pada 19 Desa yang ada di Kecamatan Sonder. Kecamatan Sonder adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Sebelah Utara berbatasan dengan kota Tomohon, Timur dengan Kecamatan Romboken, Selatan dengan Kecamatan Kawangkoan, Barat dengan Kecamatan Suluun Tareran (Kab. Minahasa Selatan). Waktu penelitian diperkirakan selama 2 bulan (January-february 2018) yaitu dengan mengambil sampel, membagikan kuisioner, mengumpulkan data, mengolah data dan menyajikan data.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh desa yang ada di kecamatan Sonder yang berjumlah 19 desa (yang akan diberi kuisioner 19 Bendahara dan 19 Kasie Keuangan). Sampel berjumlah 19 Kepala Desa dan 19 Bendahara yang berjumlah 38 orang.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji validitas dan uji reliabilitas instrument/kuisioner penelitian, analisis deskriptif variable dan uji beda untuk mengetahui perbandingan yang dijabarkan sebagai berikut : Uji beda t-test digunakan untuk menentukan apakah dua sampel yang tidak berhubungan memiliki nilai rata-rata yang berbeda (Ghozali, 2013). Jika nilai Sig. (2-tailed) > 0,05 maka variance sama. Sedangkan, jika nilai Sig. (2-tailed) < 0,05 maka variance berbeda. Dependent sample t-test atau sering diistilakan dengan Paired Sampel t-Test, adalah jenis uji statistika yang bertujuan untuk membandingkan rata-rata dua grup yang saling berpasangan. Sampel berpasangan dapat diartikan sebagai sebuah sampel dengan subjek yang sama namun mengalami 2 perlakuan atau pengukuran yang berbeda, yaitu pengukuran sebelum dan sesudah dilakukan sebuah treatment. Syarat jenis uji ini adalah: (a) data berdistribusi normal; (b) kedua kelompok data adalah dependen (saling berhubungan/berpasangan); dan (c) jenis data yang digunakan adalah numeric dan kategorik (dua kelompok).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas Instrumen Penelitian

Uji validitas adalah suatu langkah pengujian yang dilakukan terhadap isi/jawaban dari suatu instrument (kuisioner penelitian) dengan tujuan untuk mengukur ketepatan instrumen yang digunakan dalam suatu penelitian.

Tabel 2
Uji Validitas Instrumen Penelitian

Variabel	Pernyataan	Nilai Signifikansi	Alpha	Status
Sebelum Menggunakan SISKEUDES	1	0,000	0,005	Valid
	2	0,000	0,005	Valid
	3	0,000	0,005	Valid
	4	0,000	0,005	Valid
Setelah Menggunakan SISKEUDES	1	0,000	0,005	Valid
	2	0,000	0,005	Valid
	3	0,003	0,005	Valid
	4	0,004	0,005	Valid
Pengelolaan Keuangan Sebelum Menggunakan SISKEUDES	1	0,000	0,005	Valid
	2	0,000	0,005	Valid
	3	0,000	0,005	Valid
	4	0,000	0,005	Valid
Pengelolaan Keuangan Setelah Menggunakan SISKEUDES	1	0,000	0,005	Valid
	2	0,000	0,005	Valid
	3	0,000	0,005	Valid
	4	0,000	0,005	Valid
Pembangunan Desa Sebelum Menggunakan SISKEUDES	1	0,000	0,005	Valid
	2	0,000	0,005	Valid
	3	0,000	0,005	Valid
Pembangunan Desa Sebelum Menggunakan SISKEUDES	1	0,000	0,005	Valid
	2	0,000	0,005	Valid
	3	0,003	0,005	Valid

Sumber : Hasil Olah Data SPSS 20, 2019

Tabel 2 menunjukkan hasil uji validitas kuisioner penelitian. Berdasarkan hasil pengujian dapat dilihat bahwa semua pernyataan pada variable Sebelum Menggunakan SISKEUDES, Setelah Menggunakan SISKEUDES, Pengelolaan Keuangan Sebelum Menggunakan SISKEUDES, Pengelolaan Keuangan Setelah Menggunakan SISKEUDES, Pembangunan Desa Sebelum Menggunakan SISKEUDES, dan Pembangunan Desa Sebelum Menggunakan SISKEUDES memiliki nilai signifikansi \leq alpha yaitu 0,05 yang berarti setiap pernyataan dinyatakan valid

Uji Reliabilitas Kuisioner Penelitian

Uji reliabilitas adalah proses pengukuran terhadap ketepatan (konsisten) dari suatu instrument (kuisioner penelitian). Pengujian ini dimaksudkan untuk menjamin instrumen yang digunakan merupakan sebuah instrumen yang handal, konsistensi, stabil dan dependibilitas, sehingga bila digunakan berkali-kali dapat menghasilkan data yang sama.

Tabel 3
Uji Reliabilitas Kuisioner Penelitian

Variabel	Pernyataan	Cronbach Alpha	Standar	Status
Sebelum Menggunakan SISKEUDES	1-4	0,815	0,60	Reliabel
Setelah Menggunakan SISKEUDES	1-4	0,640	0,60	Reliabel
Pengelolaan Keuangan Sebelum Menggunakan SISKEUDES	1-4	0,791	0,60	Reliabel
Pengelolaan Keuangan Setelah Menggunakan SISKEUDES	1-4	0,775	0,60	Reliabel
Pembangunan Desa Sebelum Menggunakan SISKEUDES	1-3	0,816	0,60	Reliabel
Pembangunan Desa Setelah Menggunakan SISKEUDES	1-3	0,725	0,60	Reliabel

Sumber : Hasil Olah Data SPSS 20, 2019

Tabel 3 menunjukkan hasil uji reliabilitas kuisioner penelitian. Berdasarkan hasil perhitungan Sebelum Menggunakan SISKEUDES memiliki nilai Cronbach Alpha sebesar $0,816 \geq 0,60$ yang berarti setiap pernyataan dinyatakan reliabel. Setelah Menggunakan SISKEUDES memiliki nilai Cronbach Alpha sebesar $0,640 \geq 0,60$ yang berarti setiap pernyataan dinyatakan reliabel. Pengelolaan Keuangan Desa Sebelum Menggunakan SISKEUDES memiliki nilai Cronbach Alpha sebesar $0,791 \geq 0,60$ yang berarti setiap pernyataan dinyatakan reliabel. Pengelolaan Keuangan Desa Setelah Menggunakan SISKEUDES memiliki nilai Cronbach Alpha sebesar $0,775 \geq 0,60$ yang berarti setiap pernyataan dinyatakan reliabel. Pembangunan Desa Sebelum Menggunakan SISKEUDES memiliki nilai Cronbach Alpha sebesar $0,816 \geq 0,60$ yang berarti setiap pernyataan dinyatakan reliabel. Pembangunan Desa Setelah Menggunakan SISKEUDES memiliki nilai Cronbach Alpha sebesar $0,725 \geq 0,60$ yang berarti setiap pernyataan dinyatakan reliabel.

Hasil Penelitian

Perbedaan Sebelum dan Sesudah Menggunakan SISKEUDES

Tabel 4
Perbedaan Sebelum dan Sesudah Menggunakan SISKEUDES

		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	Sebelum Menggunakan SISKEUDES - Setelah Menggunakan SISKEUDES	16.1053 17.2105	2.66904	.43297	-1.98255	-.22797	-2.553	37	.015

Sumber : Hasil Olah Data SPSS 20, 2019

Tabel 4 menunjukkan hasil uji perbedaan sebelum dan sesudah menggunakan SISKEUDES. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar $0,015 < \alpha = 0,05$ yang berarti terdapat perbedaan sebelum dan sesudah menggunakan aplikasi SISKEUDES. Nilai rata-rata sebelum menggunakan SISKEUDES adalah sebesar 16,1053 dan nilai rata-rata setelah menggunakan SISKEUDES adalah sebesar 17,2105 yang berarti setelah menggunakan aplikasi SISKEUDES lebih baik daripada sebelum menggunakan aplikasi SISKEUDES.

Perbedaan Pengelolaan Keuangan Desa Sebelum dan Sesudah Menggunakan SISKEUDES

Tabel 5
Perbedaan Pengelolaan Keuangan Desa Sebelum dan Sesudah Menggunakan SISKEUDES

		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	Pengelolaan Keuangan Desa Sebelum Menggunakan SISKEUDES -	16.0789	2.85396	.46297	-2.20123	-.32508	-2.728	37	.010
	Pengelolaan Keuangan Desa Setelah Menggunakan SISKEUDES	17.3421							

Sumber : Hasil Olah Data SPSS 20, 2019

Tabel 5 menunjukkan hasil uji perbedaan pengelolaan keuangan desa sebelum dan sesudah menggunakan SISKEUDES. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar $0,010 < \alpha = 0,05$ yang berarti terdapat perbedaan pengelolaan keuangan desa sebelum dan sesudah menggunakan aplikasi SISKEUDES. Nilai rata-rata pengelolaan keuangan desa sebelum menggunakan SISKEUDES adalah sebesar 16,0789 dan nilai rata-rata pengelolaan keuangan desa setelah menggunakan SISKEUDES adalah sebesar 17,3421. Berarti pengelolaan keuangan setelah menggunakan aplikasi SISKEUDES lebih baik daripada pengelolaan keuangan desa sebelum menggunakan aplikasi SISKEUDES.

Perbedaan Pembangunan Desa Sebelum dan Sesudah Menggunakan SISKEUDES

Tabel 6
Perbedaan Pembangunan Desa Sebelum dan Sesudah Menggunakan SISKEUDES

		Paired Differences					T	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	Pembangunan Desa Sebelum Menggunakan SISKEUDES -	12.6053	1.67166	.27118	-.99683	.10209	-1.650	37	.107
	Pembangunan Desa Setelah Menggunakan SISKEUDES	13.0526							

Sumber : Hasil Olah Data SPSS 20, 2019

Tabel 6 menunjukkan hasil uji perbedaan pembangunan desa sebelum dan sesudah menggunakan SISKEUDES. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar $0,107 > \alpha = 0,05$ yang berarti tidak terdapat perbedaan signifikan pembangunan desa sebelum dan sesudah menggunakan aplikasi SISKEUDES. Nilai rata-rata pembangunan desa sebelum menggunakan SISKEUDES adalah sebesar 12,6052 dan nilai rata-rata pembangunan desa setelah menggunakan SISKEUDES adalah sebesar 13,0526 yang berarti pembangunan desa setelah menggunakan aplikasi SISKEUDES lebih baik jika melihat nilai rata-rata daripada sebelum menggunakan aplikasi SISKEUDES.

Pembahasan

Perbedaan Sebelum dan Sesudah Menggunakan SISKEUDES

Sistem informasi manajemen memberikan informasi yang dibutuhkan oleh seorang manajer dalam membuat keputusan. Sistem Informasi Keuangan Daerah disingkat SIKD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Informasi keuangan daerah adalah segala informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah. Program SIMDA adalah aplikasi yang dikembangkan oleh BPKP untuk membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Keberadaan sistem keuangan desa atau siskeudes yang diterapkan sejak tahun 2015 lalu, diharapkan dapat membantu Kepala Desa memudahkan tata kelola seluruh sumber penerimaan yang diperoleh pemerintahan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan sebelum dan sesudah menggunakan aplikasi SISKEUDES. Dengan adanya penggunaan aplikasi SISKEUDES perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa menjadi lebih baik selain itu transparansi keuangan Desa serta kecepatan dalam pelaporan menjadi lebih cepat dan lebih baik.

Perbedaan Pengelolaan Keuangan Desa Sebelum dan Sesudah Menggunakan SISKEUDES

Keuangan desa adalah barang publik (public goods) yang sangat langka dan terbatas, tetapi uang sangat dibutuhkan untuk membiayai banyak kebutuhan dan kegiatan. Pemerintah desa dan BPD pasti “pusing” memikirkan begitu banyaknya kebutuhan dan kegiatan desa, padahal uang yang tersedia sangat terbatas. Karena itu, pemerintah desa dan BPD ditantang untuk mengelola keuangan secara baik dengan dasar penentuan skala prioritas. Keuangan Desa merupakan semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) adalah sebuah aplikasi pengelolaan keuangan desa yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Aplikasi Siskeudes merupakan alat bantu yang diperuntukan untuk Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban secara komputerisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pengelolaan keuangan Desa sebelum dan sesudah menggunakan aplikasi SISKEUDES. Pengelolaan keuangan dengan menggunakan aplikasi SISKEUDES memang jauh lebih baik dari pada tidak menggunakan. Ketepatan waktu penetapan APBDes ketika menggunakan Aplikasi SISKEUDES sangat baik,

Perbedaan Pembangunan Desa Sebelum dan Sesudah Menggunakan SISKEUDES

Membangun kemandirian desa dalam kerangka Desa harus dimulai dari proses perencanaan desa yang baik dan tatakelola program yang baik pula. Pembangunan yang efektif bukanlah semata-mata karena adanya kesempatan melainkan merupakan hasil dari penentuan pilihan-pilihan prioritas kegiatan. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, maka Pemerintah Desa perlu menyusun perencanaan desa yang melibatkan seluruh komponen masyarakat desa serta perangkat Desa. Proses perencanaan yang baik akan melahirkan pelaksanaan program yang baik, dan pada gilirannya akan menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan desa. Proses merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi sendiri kegiatan pembangunan desa merupakan wujud nyata dari kewenangan mengatur dan mengurus pembangunan desa yang berskala lokal desa. Pembangunan Desa yang baik akan Nampak dari pengelolaan keuangan Desa. Keuangan yang diolah dengan baik mencerminkan ketepatan waktu dalam merencanakan APBDes dan pelaporan keuangan Desa yang transparan. Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh hasil bahwa tidak terdapat perbedaan pembangunan Desa sebelum dan sesudah menggunakan aplikasi SISKEUDES. Hal tersebut dikarenakan Aplikasi SISKEUDES hanya membantu

proses perencanaan dan pelaporan Keuangan Desa menjadi lebih efektif. Sementara pembangunan Desa dipengaruhi oleh besaran anggaran yang diterima oleh Desa.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan penelitian ini adalah :

1. terdapat perbedaan sebelum dan sesudah menggunakan aplikasi SISKEUDES di pada Desa-desanya di Kecamatan Sonder.
2. terdapat perbedaan pengelolaan keuangan desa sebelum dan sesudah menggunakan aplikasi SISKEUDES di pada Desa-desanya di Kecamatan Sonder.
3. terdapat perbedaan pembangunan desa sebelum dan sesudah menggunakan aplikasi SISKEUDES di pada Desa-desanya di Kecamatan Sonder.

Saran

Saran yang di sampaikan melalui penelitian ini yaitu :

1. Pemerintah Kabupaten Minahasa sebaiknya harus memberikan pelatihan dan bimbingan teknis yang intens agar penggunaan Aplikasi SISKEUDES makin di kuasai oleh Bendahara dan Kasie Keuangan.
2. Perlu adanya perbaikan secara terus-menerus Aplikasi SISKEUDES agar pengelolaan keuangan desa menggunakan aplikasi ini akan menjadi semakin baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, (2007). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta. UPP STIM YKPPN.
- Ghozali, Imam. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Hanif N. (2011). *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta : Erlangga
- Juardi, Muchlis dan Putri. (2018). Evaluasi Penggunaan Aplikasi Siskeudes Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa (Studi Pada Desa Jenetallasa Kec. Pallangga Kab. Gowa). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jiap/article/view/5159>. Diakses Tanggal 12 September 2018.
- Juwaini, Akram dan Husnan. (2018). *Optimization Of Village Financial System (Siskeudes) For Village Financial Administration (Case Study In Dompu Village Government, Indonesia)*. *International Journal of Economic, Commerce & Management*. <http://ijecm.co.uk/volume-vi-issue-7/>. Diakses Tanggal 12 September 2018.
- Laudon, K., C dan Laudon, J., P. (2012). *Sistem Informasi Manajemen: Mengelola. Perusahaan Digital*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit. ANDI. Yogyakarta.
- Nordiawan. (2007). *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta : Salemba Empat.
- Salindeho, Kalangi dan Warongan. Analisis Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Desa Di Kecamatan Damau Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill"*. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/goodwill/article/view/17420>. (2017). Diakses Tanggal 12 September 2018.
- Setyawan, Priyono dan Iswanaji. (2017). *Development Model of E-Budgeting and E-Reporting System on the Management of Village Fund Finance*. *Jurnal Dinamika akuntansi*. <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jda/article/view/12000>. Diakses Tanggal 12 September 2018.
- Subandi. (2011). *Ekonomi Pembangunan*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung. Penerbit Alfabeta
- Syaifullah dan Burhanuddin. (2018). *Implementation of SISKEUDES Based on Top Management Support and Education and Training*. *International Journal of Scientific Research in Computer Science, Engineering and Information Technology*. <http://ijsrcseit.com/CSEIT183168>. Diakses Tanggal 12 September 2018.

Todaro (2000). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Edisi Ketujuh, Jakarta. Erlangga,
Widjaja, A.W. (2003). *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Bulat, dan Utuh*. Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada.
www.bpkp.go.id, 2018

